

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hakekat dasar pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat dari segenap upaya perubahan. Secara konseptual dan operasional yang dituangkan dalam berbagai program yang berimplikasi pada upaya pembangunan sosial ekonomi penduduk. Strategi pembangunan yang secara khusus difokuskan bagi pemberdayaan penduduk di daerah pedesaan, dinilai sangat tepat. Sebab bagi Indonesia masih banyak penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, yang sebagian besar menetap di daerah pedesaan. Kondisi semacam ini, sangat memerlukan keterlibatan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun swasta, agar dapat memacu meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah pedesaan dengan perkotaan menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga penduduk lebih terkonsentrasi pada kawasan yang lebih memberi jaminan hidup berikut segala kemudahannya. Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga ditandai oleh rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di pedesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Selain itu tingginya ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kawasan perkotaan. Menyebabkan wilayah perkotaan menjadi target konsentrasi penduduk. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan

kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang secara langsung berbatasan dengan Ibukota Negara Republik Indonesia. Wilayah Jawa Barat yang luasnya 29.276,72 km², dihuni penduduk 42.194.869 jiwa (Suseda 2008, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat). Sekitar 70 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi di kawasan utara (terutama Bogor dan Bekasi) dan bagian tengah termasuk Bandung. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kawasan Jawa Barat Selatan minimnya populasi manusia menyebabkan rendahnya peningkatan pembangunan di kawasan tersebut.

Tabel 1.1
Sebaran Penduduk Jawa Barat Tahun 2008

No	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Utara	9.863,73	18.805,779
2	Tengah	8.083,73	14.671,324
3	Selatan	11.337,16	8.717,766

Sumber : Suseda 2008, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Data pada tabel tersebut diatas sangat jelas menunjukkan bahwa Jawa Barat bagian selatan yang wilayahnya lebih luas dari bagian tengah dan utara tetapi memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil. Hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa Jawa Barat bagian selatan belum berkembang maksimal seperti halnya bagian utara dan tengah.

Tabel 1.2
IPM Jawa Barat Tahun 2008

No	Wilayah	Komponen				IPM
		AHH	AMH	RLS	PPR	
1	Utara	68,44	95,20	7,99	629,65	71,54
2	Tengah	67,92	97,59	8,21	625,58	72,07
3	Selatan	65,91	97,41	6,89	622,79	69,73

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008, BPS Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

- AHH : Angka Harapan Hidup
 AMH : Angka Melek Huruf
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah
 PPR : Pengeluaran Perkapita Rill

Berdasarkan tabel diatas nampak jelas bahwa Jawa Barat bagian selatan memiliki nilai IPM yang lebih rendah dibandingkan utara dan tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH), angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Perkapita Rill (PPR) di Jawa Barat bagian selatan masih rendah.

Tabel 1.3
IPM Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2008

No	Kabupaten/Kota	IPM
1	Sukabumi	69,21
2	Cianjur	67,65
3	Garut	69,99
4	Tasikmalaya	71,24
5	Ciamis	70,14
6	Banjar	70,17

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008, BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas nampak jelas bahwa diantara kabupaten di Jawa Barat bagian selatan, Cianjur memiliki nilai IPM yang lebih rendah. Rendahnya IPM di Cianjur sudah pasti akan terkait dengan laju pembangunan yang belum memenuhi harapan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul berbagai gagasan agar pembangunan Jawa Barat bagian selatan ditangani secara khusus. Program yang sangat serius untuk mengembangkan Jawa Barat Selatan antara lain perumusan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa Barat Selatan yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang disusun pada Tahun 2004. Menurut Pemda Jawa Barat, ada tiga strategi yang direkomendasikan dalam kebijakan tersebut yaitu: (1) Arahana tata ruang di Jawa Barat sebaiknya pada sektor unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, industri kecil, dan pariwisata. (2) menetapkan 2 kutub perkembangan utama di Jawa Barat Selatan yakni Pangandaran dan Palabuhanratu, dan (3) Strategi dan kebijakan ekonomi kerakyatan dianjurkan melakukan tumpang sari dari tanaman pertanian serta tanaman pangan di area perkebunan, penerapan agropolitan, dan kelembagaan sosial-ekonomi ke arah sektor perbankan.

Mengacu pada berbagai kenyataan dan adanya kemauan baik dari pemerintah maupun swasta harus mengembangkan potensi ekonomi kawasan Jawa Barat Selatan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I serta Pemerintah Daerah Tingkat II di wilayah-wilayah pesisir selatan Jawa Barat, mengadakan program transmigrasi lokal (translok). Dalam transmigrasi lokal (translok), tidak hanya untuk warga pendatang saja, warga setempat pun dapat masuk sebagai penghuni lokasi transmigrasi lokal. Melalui program transmigrasi lokal ini diharapkan terjadi peningkatan ekonomi rumah tangga dan taraf kehidupannya, dengan mengandalkan sektor pertanian sebagai alternatif utama.

Upaya mengembangkan potensi ekonomi Jawa Barat Selatan ini sudah muncul sekitar tahun 1980-an. Namun upaya nyata ke arah itu mulai tampak pada tahun 1995 ketika Pemerintah Daerah Jawa Barat merintis pembuatan jalan lintas Jawa Barat Selatan sepanjang 700 kilometer dari Ciamis-Sukabumi, melalui pesisir selatan Tasikmalaya dan Garut. Namun, karena minimnya jumlah sumber daya manusia, juga kondisi medan yang labil dan mudah longsor, serta badai krisis moneter datang menerpa tahun 1997, maka proyek ini tertunda.

Tampaknya, program transmigrasi lokal (translok) ini merupakan salah satu jawaban tepat dalam rangka menunjang pembangunan di kawasan itu. Saat ini telah disediakan lahan sekitar 13.000 hektar untuk menampung peserta transmigrasi lokal (translok) tersebut. Lahan tersebut terbentang dari Ciamis hingga Ujungkulon (Pandeglang). Beberapa di antaranya lahan bekas hak guna usaha (HGU) perkebunan swasta dan negara. Ada pula lahan konversi dari Perum Perhutani III, berikut tanah negara yang selama ini tidak tergarap.

Diperkirakan masih ada sekitar 70.000 hektar lahan yang belum terjamah di pesisir selatan Jawa Barat. Dalam jangka pendek, lahan tersebut diproyeksikan dapat menampung warga Jawa Barat yang terkena proyek strategis, seperti Proyek Bendungan Jatigede (Kabupaten Sumedang). Mereka ini jumlahnya tak kurang dari 6.642 kepala keluarga (KK). Untuk jangka pendek pula, sasarannya tertuju pada warga asal Jawa Barat yang terpaksa eksodus dari unit permukiman transmigrasi (UPT) di Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, dan Irian Jaya. Sedangkan sasaran jangka panjang adalah para warga Jawa Barat yang hidup di

bawah garis kemiskinan. Terutama, bagi yang mendiami kawasan padat penduduk dan sulit mendapatkan akses untuk menggapai taraf hidup memadai.

Cianjur selatan merupakan salah satu wilayah tertinggal di Jawa Barat yang memiliki akselerasi kemiskinan yang semakin tinggi sebagai akibat dari pembangunan yang tidak merata. Berdasarkan surat usulan dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 475.1/29-99/BAPPEDA tanggal 9 november 1999 menetapkan lokasi transmigrasi lokal di Koleberes Kecamatan Cikadu-Kabupaten Cianjur dengan luas lahan pemukiman seluas 456,25 ha. Luas lahan pekarangan 26,25 ha, luas lahan usaha 420 ha dan luas fasilitas umum sekitar 10 ha.

Saat ini transmigrasi lokal (translok) tersebut berasal dari Kabupaten Cianjur, Bandung, Subang, Purwakarta, Sumedang dan Cirebon. Para peserta transmigrasi lokal (translok) memperoleh bangunan rumah seluas 500 meter persegi dengan tanah garapan seluas 8.000 meter persegi. Para penghuni transmigrasi lokal (translok) juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas secara gratis, termasuk mendapatkan bantuan sandang, alat tidur, alat dapur, alat penerangan dan alat pertanian. Bahkan, ke depan mereka akan diberikan sertifikat tanah yang digarapnya secara gratis. Selain itu para peserta transmigrasi lokal akan diberikan pelatihan dan keterampilan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perkembangan transmigrasi lokal di Kecamatan Cikadu telah berlangsung lebih dari sembilan tahun. Tujuan transmigrasi lokal sudah sangat jelas, perkembangan transmigrasi lokal selama lebih dari sembilan tahun dipandang perlu untuk dipantau terutama dari sisi perkembangan kondisi sosial ekonomi

transmigran. Harapan semua pihak menginginkan ada perubahan kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba mengungkapkan kondisi kehidupan sosial ekonomi para transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kehidupan sosial ekonomi transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diambil dalam penelitian adalah mengenai “Kehidupan sosial ekonomi transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur”. Dari permasalahan di atas diimplementasikan ke dalam beberapa pertanyaan yang menjadi batasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah tingkat kesejahteraan transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan tingkat kesejahteraan transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat kesejahteraan transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkat kesejahteraan transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Diperoleh data mengenai tingkat kesejahteraan transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur
2. Diperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkat kesejahteraan transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

1.6 Definisi Operasional

Kalau memperhatikan topik, penelitian terdiri atas dua variabel utama, yaitu kesejahteraan penduduk dan faktor-faktor penyebab terjadinya kesejahteraan. Berikut ini beberapa definisi operasional yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang terdapat pada judul penelitian yaitu:

Transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk dalam satu pulau. Dalam hal ini pemerintah daerah yang bersangkutan ikut menampung pembiayaan. Transmigrasi lokal menurut Pedoman Umum Pemindahan dan Penempatan Departemen Transmigrasi dan PHH tahun 1995 adalah:

Kegiatan pemukiman kembali penduduk setempat di daerah transmigrasi, kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan margasatwa, kawasan suaka budaya, daerah aliran sungai dan daerah bencana alam serta penduduk setempat yang hidup berpindah-pindah dan berpencar-pencar ke lokasi pemukiman transmigrasi.

Menurut pengertian tersebut program transmigrasi lokal adalah penempatan calon transmigran ke daerah pengembangan wilayah daerah asal dari kawasan hutan lindung, hutan produksi hutan margasatwa, kawasan suaka budaya, daerah aliran sungai dan daerah bencana alam yang menjadi lokasi permukiman transmigrasi.

Kondisi sosial ekonomi, menurut Bintarto (1977:51) mengenai pengertian kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebagai berikut:

Kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup. Dengan 5 parameter yang digunakan untuk mengukur kondisi sosial-ekonomi: 1) Usia, 2) Jenis kelamin, 3) Pendidikan, 4) Pekerjaan, 5) Pendapatan.

Sedangkan Singarimbun (dalam Taryono, 2009:20) mengemukakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebagai berikut:

Kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah keadaan struktur sosial-ekonomi masyarakat dalam suatu daerah. Dengan 4 parameter yang dapat digunakan: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Transportasi, 4) Mata pencaharian.

Berdasarkan kedua pendapat di atas bahwa kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat dapat diukur oleh beberapa parameter. Diantaranya pendidikan, pendapatan, kesehatan, mata pencaharian dan transportasi.

Kesejahteraan berdasarkan kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:14) kesejahteraan adalah "...hal atau keadaan sejahtera: keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup disebabkan kemakmuran."

Dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk akan merasakan dan menimbulkan ketentraman dan ketenangan hidup dalam menyongsong kehidupan yang akan datang dengan gembira dan optimal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Solih (1983:14):

Kesejahteraan menggambarkan kemajuan atau kesuksesan dalam hidup baik secara materil, mental spiritual dan sosial secara seimbang, sehingga menimbulkan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga dapat menyongsong kehidupan mendatang dengan gembira dan optimal.

Kesejahteraan penduduk harus meliputi situasi yang menunjukkan kesuksesan, kemakmuran dan meliputi kebahagiaan karena adanya nasib yang baik dimana dalam mencapai itu semua harus memperhatikan indikator kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (2006:13) menetapkan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan yakni berdasarkan kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi rumah tangga, perumahan dan lingkungan serta indikator sosial lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti akan mencoba mengungkapkan tentang kehidupan sosial ekonomi transmigran lokal di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.